

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Padang, 4 Pebruari 2020

Sekretaris



Firman, SH.M.Si

NIP. 196505041990031008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	

C.27	Aset Tetap Lainnya	
C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, 4 Februari 2020

Sekretaris



Firman, SH.M.Si

NRP. 196505041990031008

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.481.732 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.481.732 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.822.522.100 atau mencapai 94,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp109.380.812.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp36.379.376.676 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp31.620.538.847; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.753.456.595 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.381.234.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp36.379.376.676

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.416.479 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp100.129.276.169 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-100.120.859.690, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp283.243.197 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-99.837.616.493.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp6.126.964.788, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-99.837.616.493 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 615.346.815 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 129.474.681.566 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp36.379.376.676

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

U R A I A N	Catatan	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	12.481.732	-	29.545.285
JUMLAH PENDAPATAN		-	12.481.732	-	29.545.285
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.782.488.000	4.707.194.958	98,43	4.876.958.097
Belanja Barang	B.2.2	104.130.324.000	98.689.706.242	94,78	22.705.702.580
Belanja Modal	B.2.3	468.000.000	425.620.900	90,94	759.830.000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		109.380.812.000	103.822.522.100	94,92	28.342.490.677

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	8.416.479	70.785
Jumlah Pendapatan		8.416.479	70.785
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	4.707.194.958	4.876.958.097
Beban Persediaan	D.4	1.405.757.541	386.870.278
Beban Barang dan Jasa	D.5	93.130.654.154	14.264.242.195
Beban Pemeliharaan	D.6	140.587.415	379.496.640
Beban Perjalanan Dinas	D.7	249.031.083	5.170.858.206
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	496.051.018	448.346.729
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		100.129.276.169	25.526.772.145
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(100.120.859.690)	(25.526.701.360)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(11.313.056)	9.563.000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	294.556.253	32.474.946
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		283.243.197	42.037.946
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(99.837.616.493)	(25.484.663.414)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(99.837.616.493)	(25.484.663.414)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	6.126.964.788	3.612.876.983
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(99.837.616.493)	(25.484.663.414)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	615.346.815	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	633.284.000	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(17.937.185)	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		615.346.815	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	129.474.681.566	27.998.751.219
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		30.252.411.888	2.514.087.805
EKUITAS AKHIR	E.6	36.379.376.676	6.126.964.788

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim,	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2020	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	5,873,365,000	4,782,488,000
Belanja Barang	2,088,431,000	104,130,324,000
Belanja Modal	-	468,000,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	7,961,796,000	109,380,812,000

Realisasi Pendapatan
Rp12,481,732

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12,481,732 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12,481,732. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dibanding dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	12,481,732	-
Jumlah	-	12,481,732	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 57.75 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,481,732	29,545,285	(57.75)
Jumlah	12,481,732	29,545,285	(57.75)

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak
#VALUE!

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp12,481,732

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing- masing sebesar Rp12,481,732 dan Rp29,545,285. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar 57.75 dari TA 2019 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun Anggaran 2020 menurun dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 hanya terdiri dari Denda Pengadaan dan Belanja Barang TAYL. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,481,732	29,545,285	(57.75)
Jumlah	12,481,732	29,545,285	(57.75)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	5,243,000	(100.00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8,416,479	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	253	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4,065,000	19,911,500	(79.58)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	4,320,000	(100.00)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	70,785	(100.00)
Jumlah	12,481,732	29,545,285	(57.75)

Realisasi Belanja
Rp103,822,522,100

B.2 Belanja

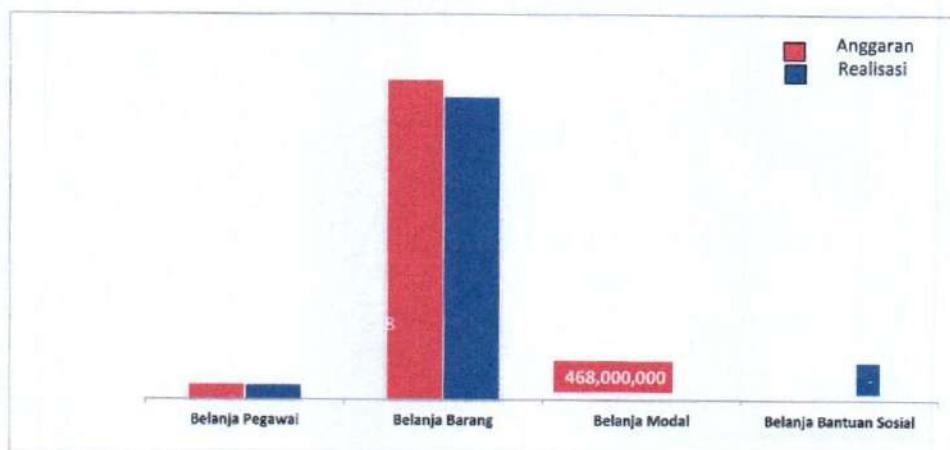
Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp103,822,522,100 atau 94.92 % dari anggaran belanja sebesar Rp.109,380,812,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	4,782,488,000	4,707,194,958	98.43
Belanja Barang	104,130,324,000	98,689,706,242	94.78
Belanja Modal	468,000,000	425,620,900	90.94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	109,380,812,000	103,822,522,100	94.92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 266.31%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran dikarenakan pada Tahun 2020 KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020. Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Pegawai	4,707,194,958	4,876,958,097	(3.48)
Belanja Barang	98,689,706,242	22,705,702,580	334.65
Belanja Modal	425,620,900	759,830,000	(43.98)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	103,822,522,100	28,342,490,677	266.31

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp4,707,194,958

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4,707,194,958 dan Rp4,876,958,097. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 3.48 % dari TA 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 ada pengurangan dalam besaran pembayaran terkait THR Tahun 2020 dan Gaji Ke-13 Tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid -19

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,424,571,700	1,305,026,800	9.16
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,545	21,515	(4.51)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91,667,590	85,161,130	7.64
Belanja Tunj. Anak PNS	28,920,454	24,919,364	16.06
Belanja Tunj. Struktural PNS	131,170,000	127,940,000	2.52
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	4,377,467	3,509,721	24.72
Belanja Tunj. Beras PNS	72,782,100	67,785,120	7.37
Belanja Uang Makan PNS	179,219,000	177,757,000	0.82
Belanja Tunjangan Umum PNS	58,940,000	57,380,000	2.72
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,715,526,102	3,027,459,838	(10.30)
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	4,707,194,958	4,876,960,488	(3.48)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	2,391	(100.00)
Jumlah Belanja	4,707,194,958	4,876,958,097	(3.48)

Realisasi Belanja
Barang
Rp98,689,706,242

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp98,689,706,242 dan Rp22,705,702,580. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 334.65% dari Realisasi TA 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 sedang dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Barang Operasional	678,752,150	526,480,500	28.92
Belanja Barang Non Operasional	92,313,622,772	3,176,385,330	2,806.25
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,168,938,290	2,883,125,149	79.28
Belanja Jasa	139,774,532	10,571,820,854	(98.68)
Belanja Pemeliharaan	140,587,415	379,400,640	(62.94)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	249,031,083	5,173,587,206	(95.19)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	98,690,706,242	22,710,799,679	334.55
Pengembalian Belanja	1,000,000	5,097,099	(80.38)
Jumlah Belanja	98,689,706,242	22,705,702,580	334.65

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp367,215,000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp127,987,774 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2020

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	117,115,000	110,557,774	94.40
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	250,100,000	17,430,000	6.97
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	367,215,000	127,987,774	34.85

Realisasi Belanja Modal
Rp425,620,900

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp425,620,900 dan Rp759,830,000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 43.98% dibandingkan TA 2019 disebabkan oleh penurunan belanja modal terjadi karena anggaran untuk belanja modal di Tahun 2020

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379,960,900	729,830,000	(47.94)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45,660,000	30,000,000	52.20
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	425,620,900	759,830,000	(43.98)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	425,620,900	759,830,000	(43.98)

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp379,960,900

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp379,960,900 dan Rp729,830,000, mengalami penurunan sebesar 47.94 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan belanja modal peralatan dan mesin terjadi karena anggaran untuk belanja modal di Tahun 2020 mengalami penurunan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379,960,900	729,830,000	(47.94)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	379,960,900	729,830,000	(47.94)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	379,960,900	729,830,000	(47.94)

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp45,660,000

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp45,660,000 dan Rp30,000,000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 52.20% dibandingkan Realisasi TA 2019. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Terjadi kenaikan belanja modal gedung dan bangunan dikarenakan penambahan perbaikan gedung kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45,660,000	30,000,000	52.20
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	45,660,000	30,000,000	52.20
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	45,660,000	30,000,000	52.20

Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2019. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Rekening Mandiri	-	-
di brankas	-	-
yang sudah bentuk kuitansi	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 0

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp31,620,538,847

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp31,620,538,847 dan Rp2,194,404,203. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Kas Lainnya dan Setara Kas Lainnya	31,620,538,847.00	2,194,404,203.00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	31,620,538,847	2,194,404,203

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas baik pada Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu yang merupakan Kas Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Tanah
Rp2,426,907,000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2,426,907,000 dan Rp2,105,730,000. Nilai Tanah tersebut Terdapat penambahan nilai sebesar Rp 321.177.000,, yang merupakan hasil revaluasi aset tahun 2020 oleh KPKNL Padang dengan nomor

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	2,105,730,000
Mutasi tambah :	
Koreksi Kesalahan input IP	321,177,000
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	2,426,907,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2020

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2,127	Kel. Aia Pacah, Kec. Koto Tangah Kota Padang	2,426,907,000
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			2,426,907,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Peralatan dan Mesin
Rp3,784,541,120

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp3,784,541,120 dan Rp3,763,204,640. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	3,763,204,640
Mutasi tambah:	
Pembelian	379,960,900
Perolehan Lainnya	27,685,000
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	386,659,420
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	3,784,191,120
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(2,388,589,424)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1,395,601,696

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Terdapat belanja peralatan dan mesin selama Semester 2 Tahun 2020 terdiri dari :

1. Lap Top sebanyak 8 unit
2. LCD Projector/Infocus sebanyak 1 unit
3. LCD Monitor sebanyak 1 unit
4. Eksternal/Portable hardisk 4 TB sebanyak 3 unit
5. P.C Unit sebanyak 5 unit
6. Printer sebanyak 7 unit
7. Lemari kayu sebanyak 1 set
8. Pembatas antrian sebanyak 1 set
9. Lemari es sebanyak 1 unit
10. camera digital sebanyak 2 unit
11. A.C Split sebanyak 2 Unit
12. Scanner sebanyak 1 unit
10. camera digital sebanyak 2 unit
11. A.C Split sebanyak 2 Unit
12. Scanner sebanyak 1 unit
13. Kursi Besi/Metal sebanyak 3 unit
14. Alat penghancur kertas sebanyak 2 unit
15. Karpet sebanyak 1 set

Perolehan lainnya berupa reward dari Bank BNI Padang terdiri dari :

1. Meja rapat kayu sebanyak 1 unit
2. Kursi Besi/Metal sebanyak 10 unit

Penjelasan tentang Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

Mutasi kurang merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Mutasi kurang merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan
- 1. Sepeda Motor sebanyak 1 unit
- 2. Rotary filling sebanyak 1 unit
- 3. Kursi fiber/Plastik sebanyak 2 unit
- 4. A.C Split sebanyak 9 unit
- 5. Vertikal Blind sebanyak 1 buah
- 6. Facsmile sebanyak 2 unit
- 7. Serial Scanner sebanyak 1 unit
- 8. uniterupted power supply sebanyak 3 unit
- 9. P.C Unit sebanyak 12 unit
- 10. lap Top sebanyak 2 unit
- 11. Note book sebanyak 4 unit
- 12. Serial printer sebanyak 11 unit
- 13. monitor sebanyak 4 unit
- 14. Priter (peralatan komputer lainnya) sebanyak 5 unit
- 15. Eksternal DC/DVD Drive (rom) sebanyak 1 unit

Mutasi kurang merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan

1. White board sebanyak 1 unit
2. mesin penghitung uang sebanyak 1 unit
3. Kursi besi/metal sebanyak 3 unit
4. Meja komputer sebanyak 1 unit
5. Meja telepon sebanyak 1 unit
6. Kursi besi/fiber sebanyak 2 unit
7. Jam mekanis sebanyak 3 unit
8. peralatan personal komputer lainnya sebanyak 1 unit
9. Mobile modem/GSM sebanyak 1 unit
10. Software Komputer sebanyak 1

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp892,347,000

C.5 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp892,347,000 dan Rp365,080,000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	365,080,000
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	169,500,000
Pengembangan Nilai Aset	45,660,000
Koreksi Kesalahan Input IP	312,107,000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	892,347,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(55,055,101)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	837,291,899

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- 1. Kanopi yang merupakan perolehan lainnya dari Bank BNI sebagai bank Penampung dana hibah Pemilihan Serentak 2020
- 2. Penambahan Kanopi untuk sisi samping
- 3. Revaluasi Aset oleh KPKNL Padang dengan nomor Berita Acara BAIP-059/REV/WKN.3/KNL.01/2020. yang merupakan revisi atas nomor 016WKN.03/KNL.01/2017 tanggal 1 November 2017.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp93,306,000

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.93,306,000 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Bentuk aset tetap lainnya berupa pengecatan gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan reward dari Bank BNI sebagai bank Penampung dana hibah Pemilihan Serentak 2020.. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	93,306,000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	93,306,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	93,306,000

Mutasi tambah/kurang:

Bentuk aset tetap lainnya berupa pengecatan gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan reward dari Bank BNI sebagai bank Penampung dana hibah Pemilihan Serentak 2020.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp2.443,644,525

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp2,443,644,525 dan Rp2,310,584,508. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2020

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3,784,541,120	(2,388,589,424)	1,395,951,696
2	Gedung dan Bangunan	892,347,000	(55,055,101)	837,291,899
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	93,306,000	-	93,306,000
Akumulasi Penyusutan		4,770,194,120	(2,443,644,525)	2,326,549,595

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp350,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2020	350,000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	350,000
Saldo Nilai per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(350,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	(350,000)

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Software

Aset Lain-lain
Rp386,659,420

C.8 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp386,659,420 dan Rp296,037,334. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020	296,037,334
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	386,659,420
	-
Rampasan	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	296,037,334
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2020	386,659,420
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(380,928,186)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	5,731,234

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

Mutasi tambah merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan

1. Sepeda Motor sebanyak 1 unit
2. Rotary filling sebanyak 1 unit
3. Kursi fiber/Plastik sebanyak 2 unit
4. A.C Split sebanyak 9 unit
5. Vertikal Blind sebanyak 1 buah
6. Facsmile sebanyak 2 unit
7. Serial Scanner sebanyak 1 unit
8. uniterupted power supply sebanyak 3 unit
9. P.C Unit sebanyak 12 unit
10. lap Top sebanyak 2 unit
11. Note book sebanyak 4 unit
12. Serial printer sebanyak 11 unit
13. monitor sebanyak 4 unit
14. Priter (peralatan komputer lainnya) sebanyak 5 unit
15. Ekternal DC/DVD Drive (rom) sebanyak 1 unit

Mutasi tambah merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan

1. White board sebanyak 1 unit
2. mesin penghitung uang sebanyak 1 unit
3. Kursi besi/metal sebanyak 3 unit
4. Meja komputer sebanyak 1 unit
5. Meja telepon sebanyak 1 unit
6. Kursi besi/fiber sebanyak 2 unit
7. Jam mekanis sebanyak 3 unit
8. peralatan personal komputer lainnya sebanyak 1 unit
9. Mobile modem/GSM sebanyak 1 unit

Mutasi Kurang

KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan lelang BMN rusak berat pada tanggal 7 Oktober 2019 senilai Rp 296.037.334., dengan nomor risalah lelang 616/08/2019. KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan permohonan penghapusan aset tetap tersebut melalui surat KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 898/RT.01.SD/Sek-Prov/12/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 kemudian disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU RI melalui surat Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 156/RT.01.3-SD/SJ/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 127/RT.01.3/Kpt/04/SJ/I/2020 tanggal 31 Januari 2020, kami terima tanggal 18 Februari 2020, kemudian dilakukan penghapusan dari aplikasi SIMAK pada 22 April 2020.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 381,278,186

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp381,278,186 dan Rp285,074,278. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	(350,000)	(350,000)
Aset Lain-lain	386,659,420	(380,928,186)	5,731,234
-	-	-	-
Total	386,659,420	(381,278,186)	5,381,234

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2,182,603. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Ekuitas
Rp36,379,376,676

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36,379,376,676. dan Rp6,126,964,788. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp8,416,479

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp8,416,479 dan Rp70,785. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 11,790.20. Hal tersebut disebabkan oleh Terjadi kenaikan pada Tahun Anggaran 2020 dikarenakan bertambahnya nilai pendapatan denda pengadaaan barang Logistik Pemilu Tahun 2020. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	8,416,479	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	70,785.00	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	8,416,479.00	70,785.00	#####

Beban Pegawai
Rp4,707,194,958

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4,707,194,958 dan Rp4,876,958,097.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar 3.48 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Terjadi penurunan dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan belanja pegawai terkait THR dan Gaji Ke 13 dikarenakan Pandemi Covid-19. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,424,571,700	1,305,026,800	9.16
Beban Pembulatan Gaji PNS	20,545	19,124	7.43
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	91,667,590	85,161,130	7.64
Beban Tunj. Anak PNS	28,920,454	24,919,364	16.06
Beban Tunj. Struktural PNS	131,170,000	127,940,000	2.52
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	4,377,467	3,509,721	24.72
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	4,707,194,958	4,876,958,097	(3.48)

Beban Persediaan
Rp1,405,757,541

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,405,757,541 dan Rp386,870,278

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 263.37 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Kenaikan beban persediaan disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	108,305,260	261,469,525	(58.58)
	1,297,452,281	125,400,753	934.64
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1,405,757,541.00	386,870,278	263.37

Beban Barang dan Jasa
Rp93,130,654,154

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp93,130,654,154 dan Rp14,264,242,195.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 552.90 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Kenaikan disebabkan karena bertambahnya beban untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	431,701,650	309,826,000	39.34
	720,500	2,614,500	(72.44)
	212,790,000	184,890,000	15.09
	33,540,000	29,150,000	15.06
	182,840,875	1,315,512,220	(86.10)
	50,019,247,123	859,150,000	5,721.95
	41,999,977,000	1,001,723,110	4,092.77
	110,557,774	-	-
	74,900,086	179,195,748	(58.20)
Jumlah	93,130,654,154	14,264,242,195.00	552.90

Beban Pemeliharaan
Rp140,587,415

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp140,587,415 dan Rp379,496,640.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 62.95 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Beban Pemeliharaan turun karena berkurangnya pemeliharaan terkait pemeliharaan gedung dan bangunan dan pemeliharaan peralatan dan mesin Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	6,995,742	91,554,000	(92.36)
	133,591,673	287,846,640	(53.59)
	-	96,000	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	140,587,415	379,496,640	(62.95)

Beban Perjalanan Dinas
Rp249,031,083

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp249,031,083 dan Rp5,170,858,206

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 95.18 persen disebabkan oleh Beban perjalanan dinas mengalami penurunan dikarenakan pada TA 2020 terjadi Pandemi Covid -19 yang menyebabkan tidak banyaknya kegiatan perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	91,438,483	2,625,248,580	(96.52)
	3,300,000	70,010,000	(95.29)
	99,042,000	1,892,882,500	(94.77)
	55,250,600	582,717,126	(90.52)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	249,031,083.00	5,170,858,206	(95.18)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp496,051,018

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp496,051,018 dan Rp448,346,729.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	476,247,151	438,572,626	8.59
	17,758,688	8,070,768	120.04
	2,045,179	1,703,335	20.07
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	496,051,018	448,346,729	10.64
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	496,051,018	448,346,729	10.64

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2020	2019	0.05
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	2020	2019	0.05
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Rp-11,313,056

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-11,313,056 dan Rp9,563,000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	(11,313,056)	-	-
Jumlah	(11,313,056.00)	4,320,000	(362)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp294,556,253

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp294,556,253 dan Rp32,474,946.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	253	-	-
Penerimaan Kembali beban barang tahun Anggaran Yang Lalu	4,065,000	19,911,500.00	(79.58)
	290,491,000	-	-
	-	(2,826,554.00)	(100)
	-	15,390,000.00	(100)
Jumlah	294,556,253.00	32,474,946	807.03

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp45.000.000, sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp6,126,964,788.00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.6,126,964,788.00 dan Rp.3,612,876,983.00

Defisit LO Rp.-
99,837,616,493.00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.-99,837,616,493.00 dan Rp.-25,484,663,414.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.615,346,815 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.633,284,000.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.633,284,000.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari Terdapat

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2020

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	633,284,000
	-
Jumlah	633,284,000.0

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
17,937,185

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
	(17,937,185)
	-
Jumlah	(17,937,185.0)

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2020

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp129,474,681,566

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.129,474,681,566 dan Rp.27,998,751,219. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,350,344,047
Diterima dari Entitas Lain	(12,481,732)
Transfer Keluar	(3,763,180,749)
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	126,900,000,000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	129,474,681,566

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp 6,350,344,047, sedangkan DDEL sebesar Rp 12,481,732

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp-3,763,180,749 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2020

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.36,379,376,676.00 dan Rp.6,126,964,788.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2020

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, berikut ini proses dan implementasi hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Pemberian hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 131.000.000.000,- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 903/1999/Angg/B.Keuda-2019 dan Nomor 903/PR.07-NK/X/2019 pada tanggal 29 Oktober 2019 senilai Rp. 131.000.000.000,-.

2. KPU Provinsi Sumatera Barat membuka rekening hibah sebagaimana surat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang Nomor S-2154/WPB.03/KP.010/2019 tanggal 8 November 2019 Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nama rekening dana hibah KPU Provinsi Sumatera Barat "RPL 010 PDHL KPU PROV SUMBAR UTK 2V6745VA". Rekening dibuka pada Bank BNI Cabang Padang dengan Nomor Rekening "0877316494".

3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sehingga KPU Kabupaten/Kota wajib mengangkat bendahara pengeluaran pembantu yang akan mengelola dana hibah yang ditransfer oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Persetujuan rekening untuk KPU Kabupaten/ Kota sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang melalui surat Nomor S-429/WPB.03/KP.010/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama KPU Provinsi Sumatera Barat

4. Register hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah diterbitkan oleh Kanwil DJPN Sumatera Barat melalui Surat Nomor S-1944/WPB.03/2019 tanggal 4 November 2019 dengan nomor register 2V6745VA

5. Dana Hibah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000

6. KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan revisi hibah ke DIPA APBN Tahun anggaran 2019 melalui Revisi ke 04 DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.654301/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 465.000.000,- yang terdiri dari 2 (dua) akun yaitu honor output kegiatan (521213) sebesar Rp. 215.000.000,-, dan belanja barang operasional lainnya (521219) sebesar Rp. 250.000.000,-

7. Tanggal 7 Juli 2020 dilakukan addendum hibah dikarenakan restrukturisasi kegiatan dan anggaran hibah karena Pandemi Covid-19 dengan Nomor NPHD 903/34/Angg/B.Keuda-2020 dan Nomor 2/PR.07-NK/II/2020 dimana jumlah uang hibah yang diterima 2020 diaddendum dari Rp. 131.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 129.400.000.000,-

8. Pengesahan hibah ke KPPN Padang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00462/654301/KPU-SB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Belanja terdiri dari honor output kegiatan (521213) sebesar Rp. 67.800.000,-, dan belanja barang operasional lainnya (521219) sebesar Rp. 239.483.100,-.

9. Dana Hibah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 126.900.400.000 dan dana yang diterima ini sudah di SP2HL sebagai pendapatan Tanggal 22 Juli 2020 melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Pendapatan Nomor 00079/654301/KPU-SB/SP2HL PENDAPATAN/XII/2020 tanggal 22 Juli 2020

10. Tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan SP2HL belanja sebesar Rp. 92.304.176.081,- melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Belanja Nomor 00176/654301/KPU-SB/SP2HL BELANJA/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020. Belanja terdiri dari Belanja honor output kegiatan (521213) sebesar Rp. 49.186.146.123,-, belanja barang operasional lainnya (521219) sebesar Rp. 37.654.775.028, Belanja Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp. 5.050.633.030, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 366.960.900,- dan belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 45.660.000,-

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/HK.03.2-Kpt/Sek-Prov/II/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut

Kuasa Pengguna Anggaran	: Firman SH, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Jumiaty, S.IP
Pejabat PPSPM	: Winda Nopita, SE, Ak. M.Si
Bendahara Pengeluaran	: Ricki Setiawan, A.Md

Perubahan berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Nomor 57/HK.03.2-Kpt/Sek-Prov/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 Tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Firman SH, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Jumiaty, S.IP
Pejabat PPSPM	: Yurika Amalia, SE
Bendahara Pengeluaran	: Ricki Setiawan, A.Md


Sekretaris,
Firman, SH.M.Si
Nip 196505042009021008

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KDUAPPAW : 076010800KD BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT
KODE SATKER : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl. Cetak 03/02/2021 2:15 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	31,620,538,847	2,194,404,203	29,426,134,644	1,340.96
JUMLAH ASET LANCAR	31,620,538,847	2,194,404,203	29,426,134,644	1,340.96
ASET TETAP				
Tanah	2,426,907,000	2,105,730,000	321,177,000	15.25
Peralatan dan Mesin	3,784,541,120	3,763,204,640	21,336,480	0.57
Gedung dan Bangunan	892,347,000	365,080,000	527,267,000	144.43
Aset Tetap Lainnya	93,306,000	0	93,306,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,443,644,525)	(2,310,584,508)	(133,060,017)	5.76
JUMLAH ASET TETAP	4,753,456,595	3,923,430,132	830,026,463	21.16
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	350,000	(350,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	386,659,420	296,037,334	90,622,086	30.61
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(381,278,186)	(285,074,278)	(96,203,908)	33.75
JUMLAH ASET LAINNYA	5,381,234	11,313,056	(5,931,822)	(52.43)
JUMLAH ASET	36,379,376,676	6,129,147,391	30,250,229,285	493.55
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	2,182,603	(2,182,603)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	2,182,603	(2,182,603)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	2,182,603	(2,182,603)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	36,379,376,676	6,126,964,788	30,252,411,888	493.76
JUMLAH EKUITAS	36,379,376,676	6,126,964,788	30,252,411,888	493.76
JUMLAH EKUITAS	36,379,376,676	6,126,964,788	30,252,411,888	493.76
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	36,379,376,676	6,129,147,391	30,250,229,285	493.55

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
WILAYAH/PROVINSI : SUMATERA BARAT 0800
SATUAN KERJA : KPU PROVINSI SUMATERA BARAT 654301

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 03/02/21 2:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_saiher_komparatif -

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	12,481,732	(12,481,732)	0	0	29,545,285	(29,545,285)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	12,481,732	(12,481,732)	0	0	29,545,285	(29,545,285)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	4,782,488,000	4,707,194,958	75,293,042	98	5,189,815,000	4,876,958,097	312,856,903	94
	BELANJA BARANG	104,130,324,000	98,689,706,242	5,440,617,758	95	28,655,509,000	22,705,702,580	5,949,806,420	79
	BELANJA MODAL	468,000,000	425,620,900	42,379,100	91	794,531,000	759,830,000	34,701,000	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	109,380,812,000	103,822,522,100	5,558,289,900	95	34,639,855,000	28,342,490,677	6,297,364,323	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0800 SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 03/02/21 2:27 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,416,479	70,785	8,345,694	11,790.201
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,416,479	70,785	8,345,694	11,790.201
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,416,479	70,785	8,345,694	11,790.201
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,707,194,958	4,876,958,097	(169,763,139)	(3.481)
Beban Persediaan	1,405,757,541	386,870,278	1,018,887,263	263.367
Beban Barang dan Jasa	93,130,654,154	14,264,242,195	78,866,411,959	552.896
Beban Pemeliharaan	140,587,415	379,496,640	(238,909,225)	(62.954)
Beban Perjalanan Dinas	249,031,083	5,170,858,206	(4,921,827,123)	(95.184)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0800 SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 03/02/21 2:27 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	496,051,018	448,346,729	47,704,289	10.64
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	100,129,276,169	25,526,772,145	74,602,504,024	292.252
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(100,120,859,690)	(25,526,701,360)	(74,594,158,330)	292.22
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(11,313,056)	9,563,000	(20,876,056)	(218.3)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	9,563,000	(9,563,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,313,056	0	11,313,056	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	294,556,253	32,474,946	262,081,307	807.026
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	294,556,253	35,301,500	259,254,753	734.402
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,826,554	(2,826,554)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	283,243,197	42,037,946	241,205,251	573.78
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(99,837,616,493)	(25,484,663,414)	(74,352,953,079)	291.756
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(99,837,616,493)	(25,484,663,414)	(74,352,953,079)	291.756

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0800 SUMATERA BARAT
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 03/02/21 2:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,126,964,788	3,612,876,983	2,514,087,805	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(99,837,616,493)	(25,484,663,414)	(74,352,953,079)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	615,346,815	0	615,346,815	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	633,284,000	0	633,284,000	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(17,937,185)	0	(17,937,185)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	129,474,681,566	27,998,751,219	101,475,930,347	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	30,252,411,888	2,514,087,805	27,738,324,083	-
EKUITAS AKHIR	36,379,376,676	6,126,964,788	30,252,411,888	-



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-161287/WPB.03/KP.010/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara KPU PROVINSI SUMATERA BARAT (654301) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PADANG, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	109,380,812,000	109,380,812,000	0
2	Belanja	103,823,522,100	103,823,522,100	0
3	Pengembalian Belanja	-1,000,000	-1,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	12,481,732	12,481,732	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	31,620,538,847	31,620,538,847	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Jabatan Belum Direkam

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam

Nama Belum Direkam

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: KPU PROVINSI SUMATERA BARAT (654301)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 109,380,812,000

SAI/SA-BUN : 109,380,812,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 103,823,522,100

SAI/SA-BUN : 103,823,522,100

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,000,000

SAI/SA-BUN : -1,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 12,481,732

SAI/SA-BUN : 12,481,732

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 31,620,538,847

SAI/SA-BUN : 31,620,538,847

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Jabatan Belum Direkam

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam

Nama Belum Direkam

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah